

ABSTRACT

EVALUATION PROCESS ON THE FILLING POSITION OF THE PRIMARY LEADERSHIP IN THE ENVIRONMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT IN 2015

By
Denish Maulana S

Structural changes, especially in the position of high-ranking leadership of Primary conducted by the Government of Bandar Lampung City during the period of 2015 which was carried out within fairly close proximity to the transitional periods of substitution leadership change before the election of regional head, thus causing various public opinion related to whether the implementation of the process of filling the position has been done in accordance with applicable laws and regulations.

This research aims to see how the process of filling the top leadership of the primary done by the city government of Bandar Lampung during the period of 2015. This research is a qualitative research with descriptive type. In this study, researchers focused on research based on data and facts found during the researchin about the process of rotation implementation of ASN employees, especially on filling the position of high-ranking leadership of primary in the environment the Government of Bandar Lampung City during the period of 2015 based on Permenpan & RB Number 13 of 2014 on the procedure of selection of high leadership filling position in the government agencies which includes several stages specifically is preparation, implementation, monitoring and evaluation.. The types and sources of data consisted of primary and secondary data. The data collection technique was done through interview, documentation and observation. While the data analysis was carried out using data reduction, data presentation and conclusion.

From the results of evaluation on the filling of the top leadership in the environment of Bandar Lampung city government in 2015 through several stages, the authors provide an assessment that, the lack of clarity of legislation that became the basis of reference of implementation replenishment of structural positions during the transition period of regional head replacement. The central government should have a better alternative way to address the underlying obscurity issues that should be used local government to be the basis in the implementation of filling office in every transition moment of the change of head of region.

Keywords: Evaluation, the process on the filling position of the primary leadership, Bandar Lampung City Government.

ABSTRAK

EVALUASI PROSES PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

**Oleh
Denish Maulana S**

Perubahan struktural khususnya pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2015 yang dilakukan dalam waktu yang cukup berdekatan pada masa-masa transisi pergantian kepemimpinan kepala daerah sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga menyebabkan berbagai opini publik terkait apakah pelaksanaan proses pengisian jabatan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung selama periode tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan selama melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan rotasi pegawai ASN khususnya pada pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Bandar Lampung pada tahun 2015 berdasarkan Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Dari hasil evaluasi terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung pada tahun 2015 melalui beberapa tahapan tersebut, maka penulis memberikan penilaian bahwa, adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pengisian jabatan struktural pada masa transisi pergantian kepala daerah. Pemerintah pusat seharusnya punya alternatif cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah ketidakjelasan dasar acuan yang harus digunakan pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pengisian jabatan di setiap momen transisi pergantian kepala daerah.

Kata kunci: Evaluasi, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Pemerintah Kota Bandar Lampung.